

Dialog

Vol. 36, No. 1, Agustus 2013

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Perencanaan
Ir. Hj. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI
Taufik Budi Soetrisno, S.IP

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BORD)
Prof. Dr. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. Dedy Djubaedy (Kehidupan Keagamaan)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

REDAKTUR PELAKSANA
Abas Jauhari, M.Sos

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 36, No.1, Agustus 2013

AHMAD DUMYATHI BASHORI

Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash: 1-18

A. ZAENURROSYID

Wakaf Tunai (Studi Analisis Pengelolaan Wakaf di PPPA Daarul Quran Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004): 19-30

ALI RAMA DAN MAKHLANI

Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah: 31-46

ALI ROMDHONI, MA

Islam Berbungkus Kearifan Lokal (Local Wisdom): Menemukan Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Seni Ketoprak di Pati Jawa Tengah: 47-58

AHMAD ALI MD

Argumen Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah: 59-70

QOWAID

Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah: 71-86

SUPRAPTO

Model Penyelenggaraan Pendidikan Agama Alternatif: SD Islam Terpadu Nurul Fikri Depok Jawa Barat: 87-98

NIHAYATUL WAFIROH

Muslims' Views of Hindu Religious Life: (A Case Study of Banyuwangi Muslims in Bali): 99-106

AAM S. RUSYDIANA & ABRISTA DEVI

Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: 107-120

BOOK REVIEW

ABDUL AZIZ

Non-State: Aspek yang Terlupakan dalam Teori Gerakan Sosial: 121-138

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH

OLEH: ALI RAMA DAN MAKHLANI*)

ABSTRAK

Usaha negara-negara Islam untuk menduplikasi sistem dan model pembangunan ekonomi yang sukses diterapkan di dunia Barat tidak serta merta akan menghasilkan kesuksesan yang sama akibat perbedaan nilai-nilai, kultur-budaya, ideologi dan pandangan hidup yang berbeda yang dimiliki oleh masyarakat muslim. Tujuan dan strategi dari suatu sistem ekonomi pada hakekatnya adalah hasil logis dari pandangannya tentang dunia (*worldview*). Negara-negara Islam seharusnya mendisain model pembangunan ekonominya berdasarkan pada ajaran Islam. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia, yaitu agaman (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*) keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*). Selanjutnya, fokus pembangunan ekonomi tidak terletak pada pembangunan material semata, tetapi harus menempatkan manusia sebagai subjek dan objek utamanya dalam kaitannya sebagai *khalîfat* Allah di bumi.

KATA KUNCI:

Pembangunan ekonomi, *maqâshid syari'ah*, model pembangunan.

ABSTRACT

The efforts of muslim countries to duplicate the successful story of economic system and model of economic development practiced in the Western world will not necessarily generate the same successful story due to differences in values, culture, ideology and worldviews rooted in the Muslim communities. Goals and strategies of an economic system is basically a logical outcome of its worldview. Therefore, muslim countries should design their economic development models based on the teachings of Islam. Economic development is intended to maintain and preserve the five basic elements of human life, namely faith (dîn), self (nafs), intellect ('aql), posterity (nasl) and wealth (mâl). Furthermore, the focus of economic development does not lie on material development per se, but it must put the human beings as the central of development to play their roles effectively as khalîfat of God in this life.

KEYWORDS:

Economic development, *maqâshid syari'ah*, development model.

A. PENDAHULUAN

Suatu tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana membangun ekonominya selaras dengan ideologi agamanya. Negara-negara Islam umumnya tengah menderita keterbelakangan ekonomi

secara luar biasa, yaitu tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, fisik dan alam yang dimilikinya. Akibatnya, kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi ekonomi terjadi di mana-mana. Meskipun negara itu termasuk kaya sumber daya namun ekonominya kurang berkembang. Standar hidup rata-rata penduduknya masih rendah. Bahkan realitas yang memprihatinkan adalah pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati

*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Anggota Konsorsium Ekonomi Islam

oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakatnya, dikarenakan konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata.

Model pembangunan ekonomi yang berkembang secara pesat di dunia Barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia Muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur-budaya, nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim menjadikan agama sebagai variabel utama dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada kesamaan model pembangunan antara apa yang diaplikasikan di dunia Barat dengan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam (*maqâshid syari'ah*).

Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima masalah pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keterunan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional, mengapa pengalaman empiris model pembangunan dunia Barat tidak tepat untuk diterapkan di dunia Muslim, dan bagaimana seharusnya model pembangunan ekonomi dalam tinjauan *maqâshid syari'ah* yang kompatibel dengan pandangan hidup (*wordview*) ajaran Islam.

B. KONSEP PEMBANGUNAN PERSPEKTIF EKONOMI KONVENSIONAL

Pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis

masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Kajian ekonomi pembangunan sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang merdeka pasca Perang Dunia II. Gelombang kebangkitan politik yang melanda bangsa Asia dan Afrika sesudah Perang Dunia II menimbulkan minat besar para ahli ekonomi untuk mencurahkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara yang baru merdeka tersebut. Di sisi lain, muncul kesadaran pada negara-negara maju bahwa kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran di mana pun.¹ Masalah-masalah ekonomi yang melanda negara-negara berkembang dan kesadaran pada negara-negara maju akan dampak kemiskinan menjadi pendorong munculnya kajian ekonomi pembangunan. Walaupun minat bangsa maju dalam menghapus kemiskinan negara terbelakang (negara berkembang) tidaklah lahir dari motif kemanusiaan, tetapi utamanya didasari oleh motif politik dan ekonomi.²

Sementara itu, istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meingkat dalam jangka panjang. Di dasarkan definisi sederhana ini Jhingan³ mengindikasikan pembangunan ekonomi dalam tiga cara:

1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional dalam suatu jangka waktu yang panjang. Tetapi

¹ Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), hlm. 3.

² Negara-negara terbelakang menjadi ajang persaingan kekuatan antara sekutu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua blok kekuatan politik dunia itu berebut pengaruh atas negara-negara berkembang. Sementara itu, negara-negara berkembang tersebut sebagiannya memiliki kekayaan sumber daya ekonomi yang tentunya dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan dunia.

³ Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, hlm. 6-9.

- indikator ini kurang memuaskan dikarenakan tidak mempertimbangkan berbagai perubahan dalam pertumbuhan ekonomi. Jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional nyata dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan perkembangan ekonomi tetapi kemunduran
2. Perkembangan ekonomi berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga masih tetap mendapatkan kritikan terutama dikarenakan tidak mempertimbangkan struktur masyarakat, susunan dan besarnya penduduk, lembaga dan budaya masyarakat, pola sumber-sumber dan bahkan distribusi output ke dan antara anggota masyarakat.
 3. Perkembangan ekonomi dilihat dari titik kesejahteraan ekonomi. Artinya perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini pun tidak luput dari berbagai keterbatasan.

Definisi dan tujuan pembangunan dalam ekonomi konvensional dibahas dalam suatu kesatuan, di mana pengertian dimulai dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan dari pembangunan. Misalnya, pembangunan ekonomi⁴ adalah usaha perekonomian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan hasil produksi nasional secara umum; merubah struktur ekonomi agraris menjadi ekonomi industri, yang menjadikan bidang industri serta keahlian sebagai andalan, dan menjadikan tingkat pertambahan riil produk nasional dan pendapatan per kapita sebagai indikator-indikator pokok bagi pembangunan ekonomi.

Perjalanan ekonomi pembangan sebagai sebuah ilmu terus mengalami perkembangan dan peningkatan nilai, terutama terlihat dari munculnya model-model pembangunan ekonomi dengan aliran pemikiran yang beragam. Model ekonomi yang menekankan pada tahapan pembangunan, struktur ekonomi yang didorong oleh investasi, teknologi dan akumulasi human

⁴ Bakri dalam Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hlm. 24.

kapital di antaranya dapat dilihat pada: Model Rostow, Model Harrod-Domar, Model Lewis, Teori Pertumbuhan Endogen. Belakangan muncul juga model pembangunan yang menitikberatkan pada manusia sebagai pusat pembangunan. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya yang direpresentasikan dalam sebuah Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.

Strategi pembangunan dalam desain teori pertumbuhan ekonomi kadang mengalami konflik tujuan yang ingin dicapai, antara tujuan kemakmuran dan keadilan. Kecenderungan inilah yang selanjutnya memunculkan teori pertumbuhan (*economic growth*), pertumbuhan dengan keadilan (*growth with justice*) dan pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*). Teori pembangunan adalah faktor-faktor pokok yang mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Teori adalah dasar bagi strategi pembangunan. Teori dan strategi pembangunan tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama oleh pandangan hidup masyarakatnya.

Pandangan hidup suatu bangsa memberikan warna arah (perspektif) pada suatu strategi, serta mempengaruhi pilihan teoritis mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.⁵ Tujuan dan strategi dari suatu sistem ekonomi pada hakekatnya adalah hasil logis dari pandangannya tentang dunia.⁶ Sebagai contoh misalnya, jika alam semesta termasuk sumber ekonomi di dalamnya terjadi dengan sendirinya, tanpa ada desain dan tujuan utama dari penciptanya, maka manusia akan berkehendak sebebas-bebasnya dan sesuka hatinya dalam mengeksploitasinya. Tujuan hidupnya hanya untuk mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum tanpa mempertimbangkan bagaimana merealisasikan dan dampaknya terhadap pihak lain.

Dengan demikian suatu teori yang cocok dan dapat diterima dalam suatu sistem masyarakat dengan pandangan hidup tertentu, belum cocok bagi yang lain. Dalam konteks ini An-Nabhani⁷

⁵ Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 32

⁶ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 5.

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 47.

membedakan antara sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi (teori ekonomi). Kedua hal tersebut sama-sama membahas tentang ekonomi, akan tetapi keduanya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Ilmu ekonomi terfokus pada kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut memperbanyak maupun pengedarannya. Sementara sistem ekonomi berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusian harta kekayaan. Sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Di lain pihak, ilmu ekonomi sebagai sains murni, yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup tertentu.

Pandangan yang sama pula dikemukakan oleh Baqir Ash-Shadr⁸ (w. 1979) yang membedakan antara ekonomi sebagai sistem dan ekonomi sebagai ilmu. Sebagai sistem, ekonomi mengacu pada cara bagaimana masyarakat mengatur kegiatan ekonominya, ia mengacu pada cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya. Sistem ekonomi melingkupi sistem kepemilikan, pengaturan dan pengembangan kekayaan. Sedang sebagai ilmu, ekonomi mengacu pada upaya untuk memahami kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya. Yang masuk cakupan ekonomi sebagai ilmu seperti hukum hasil yang berkurang (*law of diminishing returns*), hukum penawaran dan permintaan (*law of supply and demand*), dan lain-lain.

Didasarkan pada pandangan Shadr tersebut, terlihat perbedaan mendasar antara sistem dan ilmu ekonomi. Sistem ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi (keadilan sosial). Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal dan atau cita-cita kehidupan.

Sementara Triono⁹ menganggap bahwa teori ekonomi yang dikembangkan dipengaruhi oleh

⁸ Baqir Ash Shadr, M., *Buku Induk Ekonomi Islam "Iqtishaduna"*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 80-88.

⁹ Triono, Dwi Condro, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), hlm. 29-64

sistem ekonominya. Meskipun cakupannya berbeda tetapi saling mempengaruhi. Ia mengibaratkan teori ekonomi dengan sistem ekonomi seperti air dalam gelas. Bentuk air dalam gelas tergantung pada bentuk gelasnya. Artinya, bentuk teori ekonomi tergantung pada sistem atau doktrin ekonomi yang mempengaruhinya. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa teori dan sistem ekonomi adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Berdasarkan perspektif tersebut, teori ekonomi yang dipengaruhi oleh doktrin (sistem) suatu masyarakat tertentu belum tentu cocok dengan suatu masyarakat yang memiliki doktri atau pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda. Teori ekonomi pembangunan yang sukses di suatu daerah belum tentu cocok dan sukses di tempat lain, dikarenakan perbedaan pandangan hidup yang berbeda. Alasan ini yang mendasari kenapa sistem sosialisme terutama pola strategi pembangunan yang diadopsi bahkan dipaksakan pada negara-negara berkembang terutama negara-negara Muslim mengalami kegagalan bahkan berujung pada *chaos* dalam segala bidang.¹⁰ Kegagalan ini utamanya disebabkan oleh sistem atau doktrin yang terkandung dalam sosialisme memiliki perbedaan yang tajam dengan masyarakat Muslim yang sangat dipengaruhi oleh doktrin Islam. Sistem sosialisme yang diimpor ke dalam negara-negara muslim menghadapi akal yang berbeda dengan akal yang berbeda dengan akal yang menciptakannya, ditawarkan kepada masyarakat yang berbeda di mana sistem itu diterapkan – baik pada latar historisnya maupun struktur kesadarannya – dan disosialisasikan pada tanah dan waktu yang lain yang berbeda dengan tanah dan waktu dari mana ia berasal. Maka yang terjadi kemudian adalah munculnya hasil yang berbeda.¹¹

Tujuan dan strategi pembangunan pada prinsipnya dipengaruhi oleh pandangan hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Atau dengan kata lain pilihan tujuan dan strategi dari sebuah sistem ekonomi adalah hasil logis dari pandangannya terhadap dunia. Tentu saja, bisa terjadi sebuah sistem ekonomi mengambil tujuan-

¹⁰ Anis Matta, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Penerbit FE UI, 1997), hlm. 98.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 99.

tujuannya dari suatu pandangan hidup, tetapi strategi yang dipakai diambil dari pandangan hidup yang lainnya. Sehingga dampaknya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Umar Chapra¹² akan terjadi konflik antara tujuan dan strategi. Konflik ini tidak saja akan menyulitkan sistem itu untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, tetapi juga akan menambah jumlah problem sosioekonomi yang tidak terpecahkan dan sulit itu.

Oleh karena itu kegagalan pembangunan di dunia muslim terutama yang memaksakan sistem kapitalisme dan sosialisme sebagai rujukan utama selalu mengalami kegagalan karena pilihan tujuan dan strategi pembangunannya berbeda dengan pandangan hidup yang diajarkan Islam. Sehingga setiap pembahasan tentang pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim, haruslah terlebih dahulu melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuannya yang seirama dengan pandangan tadi serta jenis pembangunan yang berkaitan dengannya.

Pembangunan ekonomi menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan potensial. Biasanya dihitung dalam istilah per kapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu.

Literatur tentang ekonomi pembangunan cukup banyak, tetapi umumnya tidak mampu menyelesaikan masalah kompleks pembangunan negara-negara berkembang, khususnya dunia Islam. Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik ekonomi Barat.¹³ Teori demikian jelas tidak bisa secara serta merta diaplikasikan di dunia Muslim. Terlebih lahir dari teori kapitalis. Karena kelemahan mendasar inilah, maka teori tersebut

tidak mampu menyelesaikan persoalan pembangunan yang cukup kompleks dan dinamis.

C. FILOSOFI DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Khurshid Ahmad¹⁴ meletakkan empat dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam, yaitu:

1. *Tauhîd*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya;
2. *Rubûbiyyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam;
3. *Khalîfah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.
4. *Tazkiyyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan negara.

Konsep *tauhîd* meletakkan peraturan-peraturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesama. Konsep *rubûbiyyah* berarti mengakui sifat Allah sebagai penguasa yang membuat peraturan-peraturan bagi menampung dan menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan. Konsep ini merupakan undang-undang asasi dalam alam jagat yang merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber supaya berguna, saling tolong-menolong

¹² Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 5.

¹³ Kurshid Ahmad, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam", dalam *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 8.

¹⁴ Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework", dalam *Studies Islamic Economics*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), hlm. 178.

dan saling bersekutu di antara mereka dalam kebaikan. Konsep *khalifah* menempatkan manusia selaku *khalifah* di muka bumi ini yang bertanggungjawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial dan juga prinsip organisasi sosial bagi manusia. Sementara konsep *tazkiyyah* berperan dalam penyucian hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Artinya, konsep ini mengajarkan manusia untuk membangunkan dirinya yang akhirnya dapat membangunkan semua dimensi kehidupannya termasuk dimensi ekonomi. Hasilnya adalah *falâh*,¹⁵ yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas selanjutnya dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi¹⁶ menurut Islam sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
3. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
4. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya

semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Konsep-konsep Islam menginspirasi seluruh kehidupan seorang Muslim. Kepercayaan pada keesaan Sang Pencipta alam semesta ini melimpahkan suatu kesatuan dasar pada berbagai lapisan masyarakat. Konsep *Ilâhi (Rubûbiyyah)* mencegah manusia dari kesombongan yang merupakan ciri dari peradaban modern. Konsep *khalifah* dan *tazkiyyah* menjadi fondasi pada kebijakan pembangunan, memberikan kepada manusia rasa tanggung jawab dalam menjalankan urusan dunia dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan alam yang diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, konsep pembangunan ekonomi didefinisikan secara komprehensif.¹⁷

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia.¹⁸ Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau *khalifah* untuk menjalankan proses pembangunan.¹⁹ Manusia selain sebagai pelaku utama pembangunan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia, dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah.²⁰

D. KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

Menurut konsep ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi hanya melihat aspek kebendaan dan fisik semata yang mengabaikan aspek pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual diri manusia itu sendiri. Sebaliknya konsep pembangunan ekonomi dalam Islam menurut teoritikus ekonomi Islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Pembangunan ekonomi

¹⁵ Kata *falâh* dan turunannya telah diucapkan sebanyak 40 kali dalam Al-Quran. *Falâh* menurut Umar Chapra adalah "real well-being of all the people living on earth, irrespective of their race, colour, age, sex or nationality."

¹⁶ Kurshid Ahmad, Op. Cit., hlm. 13-15

¹⁷ Ausaf Ahmad, "Economic Development in Islamic Development Revisited", dalam *Development and Islam: Islamic Perspectives on Islamic Development*, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1998), hlm. 52.

¹⁸ Abdel Hamid El-Ghazali, "Man Is The Basis of The Islamic Strategy for Economic Development", *Islamic Research and Training Institute (IDB)*, Jedah, No. I, 1994, hlm. 42.

¹⁹ QS. Hûd [11]: 61.

²⁰ QS. Al-Dhâriyyat [51]: 56.

Islam meliputi pembangunan akhlak, spiritual dan kebendaan.²¹ Aspek akhlak, spiritual, kebendaan, sosial dan ekonomi tidak boleh dipisahkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosio-ekonomi dalam Islam. Pembangunan harus diorientasikan pada pengembangan manusia dari semua dimensinya. Kepuasan manusia tidak hanya terwujud saat kebutuhan ekonominya tercukupi tapi juga kebutuhan spiritual dan non materi lainnya.²²

Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama (*driving force*) pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia merangkul seluruh potensi dan keberdayaan dan kualitas manusia dari sudut materi, spiritual dan moral. Pembangunan ekonomi merangkul pembangunan sistem keuangan dan dasar perniagaan secara adil.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya.

Pembangunan²³ dalam pemikiran Islam bermuara pada kata *'imârah* atau *ta'mîr* sebagai isyarat dalam Al-Quran:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: "...Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya..."²⁴

Kemudian dihubungkan dengan penciptaan manusia di bumi sebagai khalifah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."²⁵

Kalimat *ista'mara* yang berasal dari kata *'amara* mengandung arti permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa usaha pembangunan di mana ekonomi salah satu dimensinya adalah misi utama penciptaan manusia di muka bumi. Sementara itu, Ahmad Ibn Ali Al-Jassas²⁷ melihat QS. *Hûd*: 61 ini dengan dua makna, yaitu makna *al-wujûd* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata *al-'imârah* (memakmurkan) identik dengan kata *at-tanmiyyah al-iqtishâdiyyah* (pembangunan ekonomi).

Para penulis teori ekonomi Islam menyimpulkan bahwa setiap ayat yang menyebutkan kata *al-kasbu*, *as-sa'yu*, *al-infâq* atau *al-dharbu fi al-ard* (berpetualang di muka bumi) menunjukkan pada suatu makna yaitu aktivitas perekonomian.²⁸ Dan ini menjadi dasar hukum pembangunan ekonomi. Pendapat ini muncul karena didorong oleh keinginan kuat kebanyakan penulis untuk

²¹ Joni Tamkin bin Borhan, "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 27, 2008, Hlm. 95.

²² Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al Shariah*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), hlm. 5.

²³ Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 44.

²⁴ QS. *Hûd* [11]: 61

²⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 30.

²⁶ Saefullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 44.

²⁷ Ahmad Ibn Ali Al Jassas dalam Asmuni Mth, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam", *Al Wawaridi*, Edisi X, 2003, hlm. 131.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

menegaskan bahwa agama Islam mendahulukan segala sesuatu yang mengandung kebaikan bagi manusia dan menghindari hal yang dapat merugikan mereka.

Berdasarkan pandangan Islam yang komprehensif terhadap segala segi kehidupan, maka konsep Islam dalam pembangunan mencakup sisi jasmani dan rohani. Juga berdasarkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hakiki bagi manusia dalam segala segi kehidupan, dengan manusia sebagai sentral dari proses pembangunan. Dengan demikian maka sesungguhnya pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehormatan dan kemuliaan manusia; baik segi materi, budaya maupun sosial.

E. TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

Berdasarkan paradigma ekonomi konvensional setidaknya terdapat dua tujuan pokok dari pembangunan ekonomi. Pertama meningkatkan pendapatan riil per kapita. Kedua menegaskan keadilan distribusi pendapatan. Namun jika dilihat fakta di lapangan justru masalah terbesar dalam perekonomian modern ini khususnya di negara-negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya diperparah oleh tingkat kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin yang semakin lebar. Perekonomian hanya digerakkan oleh segelintir orang dan tentunya juga dinikmati oleh segelintir orang tersebut. Artinya adalah permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi di antara sesama mereka.

Islam dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi tidak menafikan aspek pendapatan individu sebagai salah satu indikatornya. Karena Islam sangat mendambakan suatu masyarakat yang sejahtera secara materi agar mereka dapat melaksanakan kewajiban agamanya secara sempurna. Namun disisi lain Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata dan adil. Bahkan Islam menciptakan instrumen secara spesifik untuk mencapai distribusi tersebut melalui mekanisme zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta penumbuhan sifat kepedulian dan saling tolong-menolong di antara sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar.

Pembangunan ekonomi harus berorientasi

pada peningkatan komitmen individu terhadap agamanya. Artinya harus ada korelasi antara pembangunan ekonomi dengan peningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap agama. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi bukan seperti slogan ekonomi konvensional yang berbunyi "*homo economicus*" tapi justru terjadinya "*homo Islamicus*", yaitu individu yang berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Menurut Joni Tamkin²⁹ tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Islam adalah:

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyer-taan.
2. Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (*dhar-rûriyât*) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (*kamâliyât*) dan barang mewah (*tahsiniyât*).
3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengada-an sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan.
4. Pembangunan yang seimbang, yaitu pem-bangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.
5. Pembangunan teknologi baru
6. Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri

Tujuan pokok pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan melalui terpenuhinya segala kebutuhan pada taraf hidup sejahtera. Adapun tujuan secara umum adalah terwujudnya keadilan distribusi, efisiensi pendayagunaan sumber daya ekonomi, mengembangkan kemampuan produksi dan sumberdaya manusia. Sementara menurut Afar³⁰ tujuan pembangunan adalah menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki dalam *maqâshid syari'ah*, sebagai hak-hak

²⁹ Joni Tamkin, "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 27, Th. 2008, hlm. 98-101.

³⁰ Afar dalam Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 58.

dasar setiap individu. Berupa lima *maslahat* pokok (*al-dharuriyât al-khams*), terkait dengan segala kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Selain itu juga pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan antara daerah, serta memperhatikan kepentingan generasi mendatang berkenaan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Strategi dan model pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat muslim atau negara Muslim harus cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas muslim tersebut. Tidak boleh terjadi pertentangan antara tujuan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan.³¹

F. MAQÂSHID SYARI'AH SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN

Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah terciptanya keadilan distribusi; berarti tercapainya minimal dalam pembangunan adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan pemeliharaan *maqâshid syari'ah*, yang terdiri dari lima masalah pokok, berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi, akan menimbulkan problem ekonomi, yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera.

Al-Syatibi menganggap bahwa tujuan syariah (*maqâshid syari'ah*) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.³² Kemaslahatan manusia dapat teralisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dikembangkan, dijaga dan dilestarikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sementara itu menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari

segala sesuatu yang mengancam eksistensinya. Ia selanjutnya mengklasifikasikan *maqâshid* (tujuan) ke dalam empat pembagian utama, yaitu dengan mengatakan:³³

"The very objective of the Shariah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith (din), their self (nafs), their intellect ('aql), their posterity (nasl), and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these five serves public interest and is desirable, and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable."

Oleh karenanya, dengan jelas Al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan. dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.

Al-Ghazali kemudian membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharûriyât*, *hajiyât* dan *tahsiniyât*. *Dharûriyât* adalah merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, hidup, akal, keturunan dan harta). Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mengancam eksistensi kehidupan manusia dan akan menciptakan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat. Dan pemeliharaan dan pelestarian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia.

Sementara *hajiyât* adalah dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan peeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Dan *tahsiniyât* adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak bermaksud untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai

³¹ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 5.

³² *Ibid.*, hlm. 381.

³³ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al Shariah*, (IDB, 2008), hlm. 7.

pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

Mustafa Anas Zarqa³⁴ menjelaskan bahwa tidak terwujudnya aspek *dharûriyât* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyât* tidak sampai merusak keberadaan lima usur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek *tahsiniyât* mengabaikan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat *tahsiniyât* harus dikesampingkan jika bertentangan dengan *maqâshid* yang lebih tinggi (*dharûriyah* dan *hajiyât*).

Kebutuhan pokok ekonomi, adalah jenis dan tingkat kebutuhan ekonomi minimal yang menjadi hak setiap individu, teridentifikasi dari *maqâshid syari'ah* pada tingkatan pertama, yakni *al-dharûriyât al-khams*. Kebutuhan ekonomi pada skala *dharûriyât* adalah segala barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan skala tersebut yang harus selalu tercukupi, sebagai penentu bagi eksistensi kehidupan manusia, agar tetap mampu melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan tujuan manusia menurut perspektif Islam.

Indikator-indikator pembangunan ekonomi yang didasarkan pada *maqâshid syari'ah* (*al-dharûriyât al-khams*) dapat dilihat dari:³⁵

1. Pemeliharaan agama

Jika pokok-pokok ibadah seperti “iman”, mengucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, haji dan lain-lain, adalah sebagai indikator bagi terpeliharanya keberadaan agama, maka segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan - baik materil maupun non materil, sarana barang dan jasa - untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar tersebut antara lain merujuk pada identifikasi kebutuhan berupa sarana,

barang dan jasa yang dikemukakan ‘Abd al-Mun’im ‘Afar adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah maka setidaknya perlu disediakan antara lain: jasa da’i dan pembimbing ibadah, pencetakan dan penerbitan buku-buku agama termasuk Al-Quran dan Al Hadist, pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama.
- b. Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari:
 - Sholat: dibutuhkan mesjid dan mushollah, jasa imam dan muadzin, dana-dana waqaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
 - Zakat: pembentukan struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* dan pemetaan sebaran *mustahiq* zakat, penegakan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat, pembentukan lembaga yang intens mensosialisasikan kewajiban membayar zakat serta hukum-hukum agamnya.
 - Puasa: lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum-hukum puasa, penciptaan lingkungan yang mendukung lancarnya pelaksanaan puasa, menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan ramadhan.
 - Haji: pembentukan lembaga pengelolaan pelaksanaan haji dan lembaga pengelola dana haji, penyediaan alat transportasi dan penginapan yang nyaman dan lembaga bimbingan haji dan pengajaran manasik haji.
- c. Lembaga peradilan: dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara, majelis permusyawaratan, para hakim, lembaga urusan Islam.
- d. Lembaga keamanan: jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah, keamanan masyarakat dan negara dan memberikan hukuman bagi para pelanggar aturan-aturan yang berlaku.

³⁴ Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare, Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics* (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989) hlm. 35-36.

³⁵ Dalam uraian lebih dalam dan lengkap dapat dilihat pada Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hlm. 124-138.

³⁶ ‘Abdul Mun’im Afar, *al-Tanmiya wa al-Takhtit wa taqwin al-masyru’ât fi al-Islâm*, (Jeddah: Dar al-Arabi, 1992), hlm. 71.

2. Pemeliharaan jiwa dan akal

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa dan akal meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah). Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pembangunan ekonomi harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa).

Pemeliharaan keselamatan jiwa menurut Afar³⁷ meliputi sembilan bidang pokok:

- a. Makanan: makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu-bumbu, air bersih dan garam.
 - b. Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan
 - c. Pakaian
 - d. Perumahan
 - e. Pemeliharaan kesehatan: ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit, obat-obat, dokter, ambulans, dan lain-lain.
 - f. Transportasi dan telekomunikasi: alat transportasi darat, laut dan udara dan alat-alat komunikasi
 - g. Keamanan: jasa keamanan bagi individu dan masyarakat
 - h. Lapangan pekerjaan: pekerjaan yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman
 - i. Lindungan sosial: lembaga pemeliharaan lanjut usia, anak yatim piatu, bantuan bagi para penganggur dan jaminan sosial.
- Pemeliharaan akal dapat terdiri dari:
- a. Pendidikan: penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar.
 - b. Penerangan dan kebudayaan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

c. Penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dan lain-lain.

Indikator kesuksesan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memelihara jiwa dan akal manusia. Semua elemen-elemen penunjang dari pemeliharaan jiwa dan akal adalah mutlak disediakan.³⁸

3. Pemeliharaan keturunan dan harta

Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis.³⁹ Oleh kerennya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik (*khuluq hasan*) melalui proses tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan.

Sementara harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam. Harus ada filter moral dalam pengelolaannya.⁴⁰

Untuk menjaga keselamatan keturunan dan harta maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan⁴¹:

- a. Pemeliharaan keturunan
 - Lembaga pernikahan: mempermudah legalitas pernikahan, pembelakan pra

³⁸ Al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan, dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.

³⁹ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Shariah*, (Jedah: ITIE Book, 2008), hlm. 65.

⁴⁰ Lihat Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, edisi terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 259.

⁴¹ Abdul Mun'im Afar, *al-Tanmiya wa al-Takhtit wa taqwin al-masyru'at fi al-Islam*, hlm. 76.

pernikahan, pembinaan rumah tangga paska pernikahan, dan lain-lain.

- Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikologi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin.
- Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak, lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang mampu.
- Yayasan anak yatim: pusat pemeliharaan anak-anak yatim.

b. Pemeliharaan harta

- Pembentukan lembaga keuangan dan investasi
- Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta
- Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelanggaran riba, sogok dan korupsi.
- Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan aka-akad transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa, dan lain-lain.
- Pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam barang dan jasa primer, sebagai sarana yang harus dihasilkan dalam proses pembangunan dengan perencanaan yang tepat disertai anggaran yang memadai.

Oleh karena, pembangunan berbasis *maqâshid syari'ah* adalah pembangunan yang meletakkan prioritas utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia demi terpeliharanya

lima masalah pokok (agama, akal, jiwa, keturunan dan harta) melalui usaha dalam proses produksi atau pembangunan ekonomi.

Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu akan berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan atau tercipta kesejahteraan. Dan sebaliknya apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan merasakan ketidakpuasan, tidak damai, tidak senang, tidak bahagia, tidak aman. Kondisi ini adalah kondisi tidak sejahtera. Ketidakadaan kesejahteraan akan berdampak pada terganggunya lima masalah pokok. Oleh karenanya Al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.⁴²

Peningkatan pendapatan dan kekayaan melalui pembangunan adalah suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan, akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya tidak boleh hanya berhenti di situ. Kesejahteraan harus dilihat secara komprehensif yang juga meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar akan spiritual atau non material. Sejalan dengan Pramuwito⁴³ yang mengategorikan kondisi sejahtera jika apabila kebutuhan jasmaninya terpenuhi yang meliputi: bebas dari kelaparan, kekurangan akan pakaian, kekurangan akan perumahan, air dan udara; terjaminnya kesehatannya, tidak mengalami kesulitan dalam menjaga kesehatan dengan terjaminnya fasilitas-fasilitas kesehatan; dan kebutuhan rohaninya yang bebas dari rasa takut, cemas dan terancam. Terpenuhinya kebutuhan sosial, termasuk bebas dari berbagai ancaman dan kehidupan masyarakat yang tenteram dan harmonis.

Dengan demikian terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi yang berbasis *maqâshid*

⁴² Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid shariah* (Jedah: ITIE Book, 2008), hlm. 7.

⁴³ C. Pramuwito, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Depsos RI, 1996), hlm. 20.

syari'ah (al-dharûriyât al-khams) dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, dan juga hubungannya dengan kondisi kesejahteraan, yang bila disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah merupakan predisposisi dari kesejahteraan, dalam arti kesejahteraan sosial akan ditentukan oleh bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasararganya.

Berdasarkan hal itu maka dalam perencanaan dan proses pembangunan harus memprioritaskan sektor yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat menjadi lima masalah pokok. Sedangkan sektor-sektor produksi yang terkait dengan kebutuhan sekunder yang tidak terkait dengan eksistensi hidup manusia, dilakukan pada tahap berikutnya ketika segala kebutuhan pokok setiap individu telah terpenuhi. Namun perlu dicatat di sini bahwa kebutuhan harus dilihat secara dinamis, tingkatannya akan berubah secara dinamis seiring dengan perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Jika standar hidup rata-rata individu dalam suatu masyarakat berubah, maka otomatis standar dan tingkatan kebutuhan pun akan mengalami perubahan.

G. MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

Konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Islam lebih dari itu. Bagi Islam pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan individu beserta ummat. Tujuan utama pembangunan menurut Islam mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak atau biasa disebut sebagai *falâh*.

Kalam konteks *falâh* ini, Sadeq⁴⁴ memperkenalkan konsep *a two stage permanent life of human beings*. Kehidupan manusia terdiri dari dua tahapan berurutan, yakni kehidupan di dunia yang bersifat temporer dan kehidupan akhirat yang bersifat permanen dan abadi.⁴⁵ Islam

mengharapkan kesejahteraan (*falâh*) di kedua tahapan kehidupan manusia itu. Sehingga kesejahteraan/kebahagian manusia (*human welfare - W*) adalah fungsi dari kesejahteraan di kedua tahapan kehidupan tersebut,⁴⁶ W_t adalah kesejahteraan sementara dan W_p adalah kesejahteraan permanen. Sehingga bentuk persamaan fungsinya adalah:

$$W = f_1 (W_t, W_p) \dots (1)$$

Selanjutnya variabel W_t dan W_p adalah fungsi dari sekumpulan variabel yang mempengaruhi kesejahteraan dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupan. Persamaan fungsinya adalah:

$$W_t = f_2 (X_t, D) \dots (2)$$

$$W_p = f_3 (X_p, D) \dots (3)$$

Dimana $f_t, f_p, f_d > 0$, D adalah pembangunan ekonomi, X_t dan X_p adalah variabel yang tidak berhubungan dengan pembangunan ekonomi tetapi berdampak pada kesejahteraan di kedua kehidupan, dunia dan akhirat. Beberapa yang masuk kategori variabel X_t adalah kepuasan yang berasal dari prestasi manusia di dunia, kebahagiaan yang berasal dari hubungan antar sesama, kehidupan lingkungan yang aman dan harmonis, dan sebagainya. Sementara variabel X_p bergantung pada ibadah formal, kebaikan terhadap sesama manusia, dan lain-lain.⁴⁷ Sebenarnya perhatian utama dari hubungan fungsi tersebut adalah pengaruh pembangunan ekonomi (D) terhadap kesejahteraan manusia (W).

Sementara itu yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam adalah pertumbuhan ekonomi (*economic growth -G*), distribusi kekayaan (*distributive equity -E*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values -V*).⁴⁸ Sehingga persamaan hubungan fungsionalnya adalah:

$$D = f_4 (G, E, V) \dots (4)$$

$$\text{Di mana } f_g, f_e, f_v > 0$$

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang tinggi adalah indikator ketersediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Mencari kenyamanan hidup adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam bahkan dianjurkan selama tidak

⁴⁴ Sadeq, "Economic Development in Islam", *Jurnal of Islamic Economics*, Vol. I. No. 1 1987, hlm. 38.

⁴⁵ QS. Al-A'raf [7]: 16-17.

⁴⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 201.

⁴⁷ Sadeq, *Economic Development in Islam*, hlm. 38.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

tenggelam dalam buaian hawa nafsu yang membuat lupa kepada Allah.⁴⁹

Namun demikian, pertumbuhan pendapatan yang tinggi tidaklah cukup untuk menyediakan kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup terhadap semua populasi manusia. Karena, meskipun tingkat pendapatan tinggi tetapi tidak terdistribusi secara merata dan adil, maka hanya sebagian atau sekelompok tertentu saja yang akan menikmati pertumbuhan dan perkembangan pendapatan tersebut, sementara yang lain mengalami yang sebaliknya, yaitu kesengsaraan, kekurangan dan kemiskinan. Kondisi tersebut tidak diinginkan oleh Islam. Justru Islam menganjurkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan di saat bersamaan menghendaki terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.⁵⁰

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan dalam perekonomian, menjadi insentif bagi usaha manusia untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan mencapai pertambahan pendapatan dan kekayaan. Anjuran Islam terhadap kegiatan ekonomi bukan untuk mengakumulasi modal, tetapi semata-mata untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kemiskinan membuat individu tidak dapat menjalankan kewajiban pribadi, sosial dan moralnya, oleh karena itu setiap manusia dianjurkan untuk selalu berdoa untuk dihindarkan dari kemiskinan, kekurangan dan kehinaan. Bahkan kemiskinan akan mengantarkan kepada kakufuran.

Usaha untuk mencari nafkah adalah perintah agama yang harus ditunaikan setelah melaksanakan sholat. Hal ini menjadi insentif untuk mendorong terjadinya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁵¹ Oleh karenanya, pembangunan pertanian, industri, perdagangan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Hal ini dilakukan bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga sebagai kewajiban agama yang harus dilakukan.

Sementara itu, Umar Chapra⁵² memformulasikan sebuah model hubungan fungsional yang

menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi pembangunan dan kemunduran berdasarkan teori Ibnu Khaldum tentang penyebab maju dan runtuhnya sebuah peradaban dalam bentuk model dinamis berbasis pendekatan multidisiplin.

Model fungsional tersebut sangat dinamis dan lintas disiplin yang memasukkan variabel sosio-ekonomi dan politik, termasuk pemerintah dan otoritas politik (G), keyakinan dan aturan perilaku atau syariah (S), manusia (N), harta benda dan cadangan sumber daya (W), pembangunan (G), keadilan (J) dalam sebuah perputaran inter-dependen yang masing-masing mempengaruhi yang lain dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh yang lain pula.⁵³ Model dinamis tersebut menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, moral, sosial, dan ekonomi saling berintegrasi terus-menerus dan mempengaruhi kemajuan dan kemunduran jatuh banggunya suatu peradaban. Dalam model ini tidak mengakui adanya asumsi ceteris paribus karena tidak ada variabel yang konstan (tetap). Salah satu variabel bisa menjadi mekanisme pemicu (*trigger mechanism*) yang nantinya akan bereaksi secara berantai yang pada akhirnya akan berdampak pada maju mundurnya sebuah pembangunan dalam jangka panjang.

Simplikasi dalam bentuk hubungan fungsional faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan dan kemunduran menurut Umar Chapra adalah:

$$G = f(S, N, W, g \text{ dan } j)^{54}$$

Model ini tidak membatasi dirinya pada variabel-variabel ekonomi untuk menjelaskan pembangunan dan kemunduran. Akan tetapi mengadopsi pendekatan multi-disiplin dan dinamik untuk menunjukkan hubungan yang saling terkait antara faktor-faktor sosial, moral, ekonomi, politik, sejarah dan demografi dalam memicu kemajuan pembangunan dan kemunduran dalam masyarakat.

Diantara ke 6 (enam) variabel model fungsional yang dikemukakan oleh Umar Chapra di atas bisa saja menjadi pemicu utama (*trigger mechanism*) yang pada akhirnya saling berhubungan dengan variabel-variabel yang lain dalam memacu

⁴⁹ QS. Al-Jumû'ah [62]:7; Al-Qashash:[28] 77 dan Al-'Araf [7]: 31.

⁵⁰ Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7.

⁵¹ QS. Al-Jumû'ah [62]: 9.

⁵² Umar Chapra, *Peradaban Muslim: Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 25- 28.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁴ Dimana G= Pembangunan/kemunduran, S= Syariah, N= Manusia, W= Kekayaan, g= pembangunan dan j= keadilan.

terjadinya pembangunan ataupun sebaliknya, kemunduran. Tambahnya, faktor manusia (N) adalah kekuatan primer dalam pembangunan sebagaimana awal mula kemunculan agama Islam di tanah Arab yang mampu mengangkat bangsa Arab menjadi pemain utama dalam kejayaan peradaban Islam.

H. KESIMPULAN

Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara Barat sekuler mendorong sebagian negara-negara Muslim—masuk kategori negara berkembang—menjadikannya sebagai kiblat model dalam mendesain pembangunan ekonominya. Model-model pembangunan yang sukses dikembangkan di negara-negara maju dianggap sebagai pengalaman empiris yang bisa diduplikasi dan diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Muslim. Model pembangunan itu dianggap bersifat universal dan kompatibel untuk diterapkan di segala ruang dan waktu meskipun itu berbeda dengan ruang dan waktu di mana model itu berkembang pada awal mulanya. Atas dasar asumsi inilah kemudian studi ilmu ekonomi pembangunan yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai kajian utamanya mulai dipelajari dan diterapkan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali negara-negara Muslim.

Namun, model dan pengalaman empiris yang berkembang di dunia Barat tidak serta merta bisa diterapkan dan sukses di dunia Muslim, hal ini disebabkan perbedaan kultur-budaya, nilai-

nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang diterapkan di dunia Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekularisme, liberalisme dan kapitalisme yang sudah menjadi *worldview* sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim justru menjadikan agama sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Adanya perbedaan pandangan hidup ini akan menyebabkan terjadinya *chaos* jika sistem dan pembangunan ekonomi tersebut dipaksakan untuk diterapkan di dunia Muslim, sebagaimana sudah terjadi di beberapa negara Muslim belakangan ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan antara model pembangunan yang diterapkan di dunia Barat dan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dan tujuan dari ajaran Islam (*maqâshid syari'ah*).

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang seharusnya diterapkan di dunia Muslim harus berbasis pada *maqâshid syari'ah* yaitu terciptanya keadilan distributisi melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia agar dapat menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi menjadikan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai *khalifah* di muka bumi. Pembangunan ekonomi harus menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul Mun'im Afar, *al-Tanmiya wa al-Takhtit wa taqwîn al-masyru'ât fi al-Islâm*, (Jeddah: Dar al-Arabi, 1992).
- An Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Anis Matta, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Penerbit FE UI, 1997)
- Asmuni Mth, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam", *Al Wawaridi*, Edisi X, 2003.
- Ausaf Ahmad, "Economic Development in Islamic Development Revisited", dalam *Development and Islam: Islamic Perspectives on Islamic Development*, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1998).
- Baqir Ash Shadr, M., *Buku Induk Ekonomi Islam "Iqtishaduna"*, edisi terjemahan, (Jakarta: Zahra, 2008).

- C. Pramuwito, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Depsos RI, 1996).
- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1993).
- Joni Tamkin bin Borhan, "Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 27, 2008.
- Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework", dalam *Studies Islamic Economics*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976).
- _____, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam", dalam *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)
- Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare, Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics* (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989).
- Sadeq, "Economic Development in Islam", *Jurnal of Islamic Economics*, Vol. I. No. 1 1987.
- Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012).
- Triono, Dwi Condro, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2011).
- Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, edisi terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- _____, *Peradaban Muslim: Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi* (Jakarta: Amzah, 2009).
- _____, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al Shariah*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008).

A

Aam S. Rusydiana & Abrista Devi

Staf pengajar dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia. Email: tasik_pisan@yahoo.com. Pengajar pada Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor. Juga sebagai konsultan riset pada SMART Consulting.

“MENCARI SOLUSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 107

Abdul Aziz

“NON-STATE: ASPEK YANG TERLUPAKAN DALAM TEORI GERAKAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 121

Ahmad Ali MD

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Cirendeu Ciputat Banten, Email; alimd3708@gmail.com

“ARGUMEN FORMALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 59

Ahmad Dumyathi Bashori

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: dimyathi70@gmail.com

“KONSEP MODERAT YUSUF QARDHAWI: TOLOK UKUR MODERASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP NASH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 1

Ali Rama dan Makhlan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Anggota Konsorsium Ekonomi Islam, E-mail: rama_clb_ku@yahoo.com & makhlanKEI@yahoo.com

“PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 31

Ali Romdhoni, MA

Peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati Jawa Tengah), Email: ali_romdhoni@yahoo.com

“ISLAM BERBUNGKUS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM): MENEMUKAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM SENI KETOPRAK DI PATI JAWA TENGAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 47

A. Zaenurrosyid

Dosen STAI Matholiul Falah Pati dan Mahasiswa Program Doktoral Islamic Law IAIN Walisongo), Email : guns_rosyid@yahoo.com

“WAKAF TUNAI (STUDI ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PPPA DAARUL QURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 19

N

Nihayatul Wafiroh

Alumnae of University of Hawaii at Manoa Honolulu, Email: ninikwafiroh@gmail.com

“MUSLIMS’ VIEWS OF HINDU RELIGIOUS LIFE: (A CASE STUDY OF BANYUWANGI MUSLIMS IN BALI)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 99

Q

Qowaid

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta pusat

“GEJALA INTOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN PESERTA DIDIK DAN UPAYA ENANGGULANGANNYA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 71

S

Suprpto

Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Email: suprpto.litbang@yahoo.com

“MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ALTERNATIF: SD ISLAM TERPADU NURUL FIKRI DEPOK JAWA BARATA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 87

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com

